

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B, Guy Peters. 2000. *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge hal. 299-381
- Britha, M. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 438.
- Creswell, J. (2012). W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Deleon, L. (1998). *Accountability in a 'reinvented' government*. *Public Administration*, 76(3),
- Iqbal, H. (2004). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sugiono. (2012). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Insan Cendekia.
- Narbuko, C. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, Malang.
- Sedarmayanti, G. G. (2003). *Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung.
- Saefudin, A. (1998). *Metode penelitian*. BPFE, Yogyakarta.
- Setiyono, Budi, 2014, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: CAPS
- Stewart, J. D. (1984). *The role of information in public accountability. Issues in public sector*.
- Surakhmad, W. (1994). *Metode dan Teknik Akuntabilitas*. Bandung: Tarsito. Thousand Oaks.
- Sugiyono, M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul, MD., 2004, *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Penerbitan Universitas

Widodo, J. (2001). Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi

B. Jurnal

- Dewi, A. S. (2011). The role of local e-government in bureaucratic reform in terong, Bantul District, Yogyakarta Province, Indonesia. *Internetworking Indonesia Journal*, 3(2), 49-56.
- Evayanti, R. (2009). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fajar, W. M. (2016). *PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Hasniati, H. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 2(1), 15-30.
- Hendriyanto, R., & Setiyono, B. (2014). Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 266-275.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.
- Kumorotomo, W. (2010). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja Dan SiLPA Dalam Alokasi APBD Di Beberapa Daerah. Konferensi Administrasi Negara ke-3. Bandung.
- Kuncoro, Haryo, Perilaku ASIMETRIS Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas Perubahan Besar Transfer dari Pemerintah pusat, The, 1 Accounting Confrence Faculty of Economic Universitas Indonesia.
- Kurniawan, F. (2015). Penerapan Good Governance dalam Kebijakan Publik (Suatu Analisis tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Kota Surakarta).

- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
- Monfardini, P. (2010). Accountability in the new public sector: a comparative case study. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 632-646
- Mulgan, R.2003. Accountability: An Ever-Expanding Concept?, *Journal Public Administration*, Vol, 78, No. 3: 555-576.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public administration review*, 227-238.
- Suryana, A., & Rizki, F. (2017). SISTEM INFORMASIDESANGARIPBERBASIS WEB KABUPATEN TANGGAMUSLAMPUNG. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 2, 48-52
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budusidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik*

Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 1-16.

- Setyoko, P. I. (2012). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD).
- Sri, L., & Waluyo, L. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).

C. lain-lain

Buku saku dana desa Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

<http://www.datadesa.wonosobokab.go.id>

<http://Kemenku.go.id>

World Bank Report. (1992). *Governance and development*.

www.Republika.co.id. Diakses 16 Juni 2018 Pukul 20:34

<https://apbdes.wonosobokab.go.id/>Diakses 16 Juni 2018 Pukul

20:45

<https://www.mitradesa.id/>. Diakses 12 Desember 2018 Pukul

23:32

D. Wawancara

*Ajeng Kasih Pemerintahan Desa Sapuran Ngadikerso
Kecamatan Sapuran*

*Ratna Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Kemitraan Informatika Diskominfo Kab Wonosobo*

*Husein Sekretaris Desa Kapulogo Kecamatan Kepil
Sandi Desa Krasak Kecamatan Selomerto*

Abdulrohim Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran

*Tono Peihartono Kepala bagian Pemerintahan
Kabupaten Wonosobo*

Suripto Bendahara Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo

Hartanto Kepala Desa Dempel Kecamatan Kalibawang

Riyan Bendahara Desa Jlamprangan Kecamatan Leksono

*Agus Sekretaris Desa Pangerangan Kecamatan
Kalibawang*